

ABSTRAK

Fraud (kecurangan) sebuah tindakan yang tidak bertanggung jawab atau sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji guna ingin menguntungkan diri sendiri. Kecurangan ini dapat dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu perorangan. Biasanya kecurangan ini dilakukan karena adanya sebuah dorongan yang ingin memiliki sesuatu hal dengan instan dan tanpa ada kerja keras yang harus dilakukan oleh individu atau kelompoknya. Tujuan penelitian yaitu: (1) Menganalisis apakah Sistem Pembayaran Non Tunai berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (2) Menganalisis apakah peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; (3) Menganalisis apakah temuan hasil audit BPK dapat memoderasi pengaruh antara Sistem Pembayaran Non Tunai dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Disain penelitian ini kausal komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh system pembayaran non tunai dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan temuan hasil audit BPK sebagai variabel moderasi. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik sensus sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua anggota populasi menjadi sampel. Total responden yang menjadi anggota polulasi dan diberikan kuesioner sebanyak 138 orang. Teknik analisis data menggunakan PLS SEM.

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Sistem pembayaran non tunai berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (2) Peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemrintah Daerah. (3) Temuan audit BPK dapat memoderasi pengaruh sistem pembayaran non tunai dan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kata Kunci: Sistem pembayaran non tunai, Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah, APIP, pencegahan *fraud* Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.